

## ABSTRAK

**Yeni, Eva Putri. 2025. Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata kunci:** Efektifitas, sanksi Pidana Penjara, Narkotika.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang menghambat tidak efektifnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika yaitu faktor hukum, sosial, dan kelembagaan. Hasil efektif yang digunakan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu sanksi yang paling umum diberikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk pelaku pengedar atau produsen narkotika yaitu sanksi pidana penjara. Beberapa pelaku juga dikenai denda sebagai tambahan pidana penjara, terutama untuk pengedar atau penyelundup. Sanksi penjara dianggap efektif dalam mengurangi peredaran narkotika, namun seringkali muncul kritik bahwa pelaku justru dapat terpapar jaringan narkotika lebih besar selama di penjara. Rehabilitasi dinilai lebih efektif untuk pengguna dalam memutus rantai ketergantungan, tetapi pelaksanaannya sering kali terkendala fasilitas atau sumber daya. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penegakan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 dengan sanksi tegas untuk bandar dan rehabilitasi bagi pengguna. Kerjasama aparat penegak hukum dilakukan melalui operasi rutin dan razia. Rehabilitasi pengguna melibatkan pusat rehabilitasi dan program pemulihan berbasis medis dan psikososial. Pencegahan dilakukan melalui kampanye anti-narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan ketat daerah rawan. Koordinasi multisektoral antara pengadilan, pemerintah daerah, BNN, dan LSM, didukung dengan anggaran serta fasilitas, bertujuan memutus rantai narkotika dan merehabilitasi pelaku ke masyarakat.

## ABSTRACT

**Yeni, Eva Putri. 2025. Efektivitas Pengenaan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Hisbah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.**

**Keywords:** *Effectiveness, Imprisonment Sanctions, Narcotics*

*This study aims to identify the factors hindering the ineffectiveness of imprisonment sanctions against narcotics offenders in the jurisdiction of the Jambi District Court, the effectiveness of the measures implemented for narcotics offenders in the same jurisdiction, and the efforts to address narcotics offenses in the area. This research employs empirical juridical methods. The findings indicate that the factors hindering the ineffectiveness of imprisonment sanctions against narcotics offenders include legal, social, and institutional factors. Additionally, the lack of alternative sanctions such as rehabilitation and preventive policies poses significant obstacles to comprehensively tackling narcotics crimes. The measures commonly applied to narcotics offenders, especially dealers or producers, in the jurisdiction of the Jambi District Court are imprisonment sanctions as stipulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Some offenders are also subject to fines in addition to imprisonment, particularly for traffickers or smugglers. While imprisonment is considered effective in reducing the circulation of narcotics, it often draws criticism for exposing offenders to larger narcotics networks during incarceration. Rehabilitation is seen as more effective for users in breaking dependency chains, but its implementation is often hampered by facility or resource constraints. Efforts to address narcotics crimes in the Jambi District Court jurisdiction include law enforcement based on Law No. 35 of 2009 with strict sanctions for traffickers and rehabilitation for users. Law enforcement agencies collaborate through regular operations and raids. User rehabilitation involves rehabilitation centers and medical-psychosocial recovery programs. Prevention efforts include anti-narcotics campaigns, community empowerment, and strict monitoring of vulnerable areas. Multisectoral coordination between the judiciary, local government, the National Narcotics Agency (BNN), and NGOs, supported by budgets and facilities, aims to dismantle narcotics networks and reintegrate offenders into society.*